



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

# RENJA

## RENCANA KERJA TAHUN 2022



[dpmptsp.kotaprabumulih.go.id](http://dpmptsp.kotaprabumulih.go.id)



[dpmptsp\\_prabumulih](https://www.instagram.com/dpmptsp_prabumulih)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2022 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Prabumulih Tahun 2022. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2022 ini dilaksanakan dengan fokus pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting DPMPTSP Kota Prabumulih, evaluasi pelaksanaan Renja DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2020 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kota Prabumulih Tahun 2019-2023.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat terpenuhi.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan partisipasinya dalam penyusunan Dokumen RENJA DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2022.

Prabumulih, 08 Februari 2021

KERALA DINAS,  
  
A. Zahedi, S.Pd., MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196305011988031005

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana tahapan dan tata cara penyusunan RENJA Perangkat Daerah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih ini memuat program dan kegiatan untuk tahun 2022, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Penyusunan Renja DPMPTSP Kota Prabumulih mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2022 merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi pembangunan yang termuat dalam RKPD Kota Prabumulih Tahun 2022, yang selanjutnya Renja DPMPTSP ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan R.APBD yaitu penyusunan Kercana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Tahun 2022.

Proses penyusunan Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Penyusunan Renja OPD

Anggota Tim Penyusunan Renja OPD merupakan pejabat dan staf OPD yang benar-benar sipa dalam hal waktu, dan memiliki kemampuan teknis untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja OPD.

b. Orientasi mengenai Renja OPD

Orientasi diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja OPD, hubungan Renja OPD dengan dokumen perencanaan lain, serta mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

c. Penyusunan Agenda Kerja

Agenda kerja disusun untuk merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja OPD sampai dengan penetapan dan pengarsipan dokumen Renja. Agenda kerja ini dapat dibuat dalam bentuk bagan alir.













d. Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
- 2) Mengumpulkan data atau informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

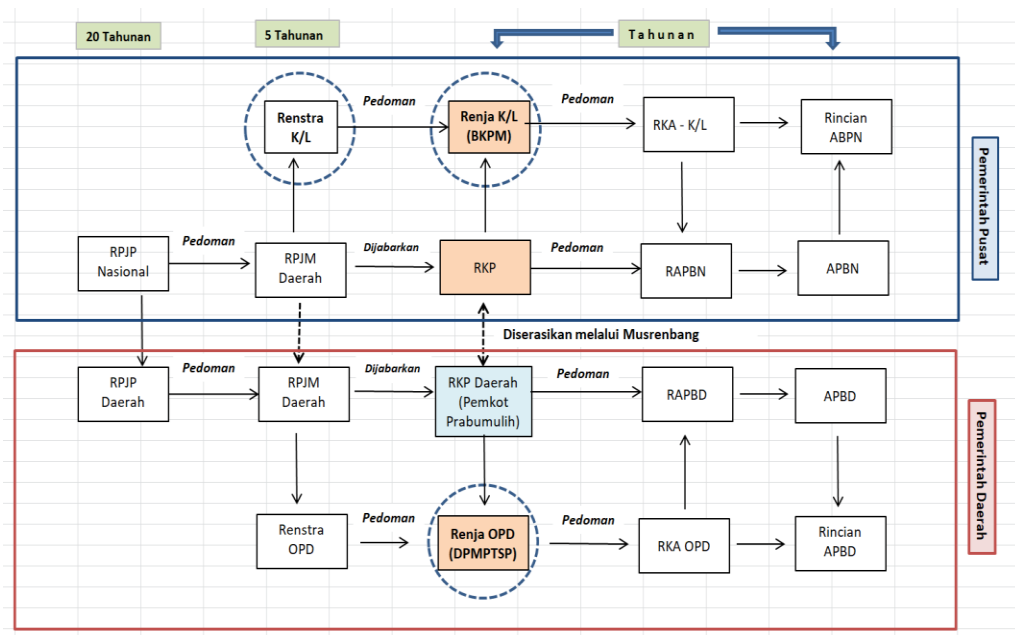
Berikut adalah bagan alir agenda kerja Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2022.

**Bagan Alir Agenda Kerja Penyusunan Renja DPMPTSP Kota Prabumulih**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan				
		Staf	Kasubbag Program dan Pelaporan	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Instansi Terkait	Kelengkapan	Waktu		Output			
1	Mengumpulkan Bahan penyusunan Renja SKPD									Dokumen Arsip	10 hari	bahan penyusunan Renja	
2	Menganalisis data dan informasi Renja yang telah terkumpul									Komputer / Laptop	5 hari	data /bahan penyusunan renja	
3	Membuat konsep rencana kerja (Renja) SKPD									Renstra, Pagu Indikatif, RKPD, IKU, IKK	10 hari	Draft Renja	
4	Mengoreksi konsep dokumen rencana kerja (Renja)									Renstra, Pagu Indikatif, RKPD, IKU, IKK, Komputer	2 hari	Draft Renja	
5	Menyampaikan dokumen rencana kerja kepada Kepala Dinas untuk meminta persetujuan									Draft Renja	2 hari	Draft Renja	
6	Penandatanganan dokumen rencana kerja oleh Kepala Dinas									Draft Renja	2 hari	Draft Renja	
7	Penggandaan dan Pengiriman Renja SKPD									Biaya pengandaan, ATK	1 hari	Dokumen Renja	
8	Pengarsipan		 							lemari arsip	1 hari	Arsip Renja	

## Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Berikut adalah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berupa alur keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP. Renstra BKPM akan menjadi dasar kebijakan penanaman modal 5 tahun ke depan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.



### **Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih;

16. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih.

### **Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Tujuan penyusunan RENJA DPMPTSP Tahun 2022 adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022;
2. Sebagai media untuk mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja;
3. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*);
4. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2022.

### **Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2022 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja seperti: **latar belakang** (yang berisi pengertian, proses penyusunan dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya); **landasan hukum** (berisikan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan peraturan lainnya yang menjadi pedoman/acuan dalam penyusunan perencanaan); **maksud dan tujuan** (berisi maksud

dan tujuan dari penyusunan Renja) dan **sistematika penulisan** yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD.

**BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD**

Pada bagian ini menjelaskan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Rensta, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD, dan penelaahan usulan program kegiatan masyarakat.

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta Program dan Kegiatan.

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB V : PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan Capaian Renstra DPMPTSP**

Bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian materil serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Alasan inilah yang mendorong terbitnya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional. Dengan terbitnya surat keputusan tersebut, Kementerian Keuangan mewajibkan Pemerintah Daerah (Pemda) menganggarkan dana kesehatan dalam APBD untuk pencegahan atau penanganan covid-19. Keputusan tersebut tertuang dalam PMK No.19 Tahun 2020 Tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU dan DID TA 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19. Imbas dari bencana ini adalah pemerintah melakukan pemotongan anggaran di tahun 2020 dikarenakan adanya penurunan pada penerimaan pajak sehingga pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan penyesuaian pada pos-pos anggaran yang kurang dirasakan langsung harus dialihkan untuk penanganan covid-19.

Anggaran DPMPTSP Kota Prabumulih juga mengalami pemotongan pada pos-pos tertentu sehingga berdampak pada program, kegiatan dan jumlah anggaran yang telah disusun dan ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020. Untuk itu DPMPTSP Kota Prabumulih menyusun kembali rencana kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) sebagai acuan yang digunakan dalam melaksanakan program kegiatan di tahun 2020. Program dan kegiatan yang tetap dilaksanakan di DPA-P ini disusun berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan dan disesuaikan dengan kondisi pandemik dimana terdapat program/kegiatan yang harus ditunda pelaksanaannya dan direalokasi anggarannya.

Perubahan postur anggaran DPMPTSP Kota Prabumulih TA.2020 akibat pandemic covid-19 berdampak pada pemangkasan anggaran program/kegiatan yang telah disusun pada Rencana Kerja TA.2020. Pada pagu anggaran induk DPMPTSP T.A 2020 mempunyai 9 Program dan 46 Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp1.919.000.000,-** dan terjadi pemotongan anggaran sehingga pada APBD-Perubahan T.A 2020 menjadi 9 (sembilan) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp1.206.400.000,-**.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2022 diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan Renja DPMPTSP dan pencapaian Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2019-2023. Evaluasi Renja tahun 2020 dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Prabumulih dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan DPMPTSP Kota Prabumulih.

Anggaran Belanja Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) TA. 2020 ditetapkan sebesar sebesar **Rp1.919.000.000,00,-**. Dalam pelaksanaannya, belanja langsung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) TA. 2020 mengalami perubahan anggaran hingga menjadi **Rp1.206.400.000,-**. Perubahan anggaran belanja langsung dalam DPA-OPD Perubahan TA. 2020 hal ini dikarenakan adanya pandemic covid-19 sehingga terjadinya penyusutan anggaran sebesar Rp712.600.000,- atau sebesar 37,68%. Realisasi anggaran belanja langsung DPMPTSP TA. 2020 sebesar **Rp1.174.419.939,-** atau sebesar **97,34%** dari anggarannya.

Untuk realisasi anggaran, hampir seluruh kegiatan telah mencapai 100%, hanya terdapat 2 (dua) kegiatan yang penyerapannya masih di bawah 70%, yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar 65,24% dan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang penyerapannya sebesar 57,50%. Pemberlakuan PSBB saat *pandemic covid* memaksa kegiatan perkantoran untuk dibatasi. Hal ini bertujuan guna mendukung upaya preventif Pemerintah dalam mencegah penyebaran penularan virus corona, sehingga sebagian pegawai DPMPTSP diberlakukan *work from home* (WFH) secara bergantian yang berdampak pada penggunaan jasa listrik kantor DPMPTSP berkurang dari kebiasaan normal

sebelum pandemic. Sedangkan untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, terjadi penurunan nilai pajak kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang dibayarkan dan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Dari 9 (sembilan) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 hanya 2 (dua) kegiatan yang pencapaian realisasinya tidak sesuai dengan target yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar 65,24% dan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang penyerapannya sebesar 57,50% karena DPMPTSP Kota Prabumulih membayar sesuai dengan tagihan yang tersedia dan lebih kecil dari yang dianggarkan.

Kondisi ini akan mengurangi capaian target realisasi keuangan Renstra dan untuk mengatasi hal tersebut, maka akan dilakukan upaya penyesuaian dalam penganggaran tahun berikutnya dengan acuan serapan tahun sebelumnya.

**Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Tahun 2020**

No.	Perangkat Daerah	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana (Rp)	Realisasi		
				Keuangan (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)
<b>1</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	100	4,000,000	100
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000,000	65.24	52,195,459	100
		3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6,000,000	57.50	3,450,000	100
		4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	51,000,000	100	51,000,000	100
		5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30,000,000	100	30,000,000	100
		6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	56,514,000	100	56,514,000	100
		7 Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	40,000,000	100	39,998,000	100
		8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.665,000	97.97	6,530,000	100
		9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.716,000	100	7,716,000	100
		10 Penyediaan Makanan dan Minuman	20,000,000	100	20,000,000	100
		11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	327,000,000	99.99	326,975,338	100
		12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	125,000,000	100	125,000,000	100
<b>2</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				
		13 Pengadaan Software dan Hardware Komputer	350,000	100	350,000	100
		14 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60,000,000	99.45	59,667,142	100
		15 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	35,000,000	99.87	34,954,000	100

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program/Kegiatan	Penyediaan Dana (Rp)	Realisasi			
				Keuangan (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	
		16	Pemeliharaan Rutin Berkala Hardware /Software/Jaringan Komputer	7,500,000	100	7,500,000	100
		17	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	45,000,000	100	45,000,000	100
		18	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	6,800,000	100	6,800,000	100
<b>3</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>					
		19	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	30,000,000	100	30,000,000	100
		20	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	16,000,000	100	16,000,000	100
<b>4</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					
		21	Peningkatan Kinerja Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Pelayanan Perizinan	9,655,000	100	9,655,000	100
<b>5</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>					
		22	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000	100	15,000,000	100
		23	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	12,000,000	100	12,000,000	100
		24	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	12,000,000	100	12,000,000	100
		25	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	12,000,000	100	12,000,000	100
		26	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD Perubahan	12,000,000	100	12,000,000	100
		27	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	10,000,000	100	10,000,000	100
		28	Penyusunan LPPD	10,000,000	100	10,000,000	100
<b>6</b>	<b>DPMPTSP</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>					
		29	Pembuatan / Pencetakan Booklet dan Leaflet dan Paper Bag	25,000,000	100	25,000,000	100

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program/Kegiatan	Penyediaan Dana (Rp)	Realisasi		
				Keuangan (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)
7	DPMPTSP	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>				
		30 Pendataan Pemberdayaan Usaha di Kota Prabumulih	10,000,000	100	10,000,000	100
8	DPMPTSP	<b>Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</b>				
		31 Pembinaan Kewajiban Perusahaan Penanamn Modal di Kota Prabumulih	12,200,000	100	12,200,000	100
		32 Penyusunan dan Pengeolahan Data Informasi Penanaman Modal di Kota Prabumulih	5,000,000	100	5,000,000	100
		33 Pemantauan dan Pengawasan PMDN dan PMA di Kota Prabumulih	27,000,000	100	27,000,000	100
9	DPMPTSP	<b>Program Peningkatan Pelayanan Umum Perizinan</b>				
		34 Fasilitasi Pelaksanaan dan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	15,000,000	96.67	14,500,000	100
		35 Fasilitasi Pelayanan Pengaduan Pelanggan/Masyarakat	5,000,000	100	5,000,000	100
		36 Pembinaan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan	50,000,000	98.83	49,415,000	100
		37 Penyusunan dan Pembuatan Buku SOP dan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	10,000,000	100	10,000,000	100
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 1,206,400,000</b>	<b>97,34</b>	<b>Rp 1,174,419,939</b>	<b>100</b>

**Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Renja DPMPSTSP Kota Prabumulih Tahun 2020 dan Realisasi Renstra**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2018-2023				
				Target Akhir Renstra (2023)	Tahun 2020			Tahun 2021
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>							
	<b>Bidang Urusan Penanaman Modal</b>							
(1)	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Meningkatkan Kapabilitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan DPMPSTSP (Persentase Layanan Administrasi/Operasional Kantor)</b>						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat (Materai dan Benda Pos Lainnya)	Lembar	4954	763	763	100	500
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon dan Listrik	Rekening	10	2	2	100	2
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional	STNK	38	7	7	100	7
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengelolaan Administrasi Keuangan DPMPSTSP	Orang	45	9	9	100	8
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Gedung Kantor DPMPSTSP Kota Prabumulih	Jenis	130	22	22	100	26
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor untuk Mendukung Tugas-tugas	Jenis	240	48	48	100	48
7	Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	Blanko Perizinan, Box Arsip	Jenis	35	8	8	100	6
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	68	11	11	100	12
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar dan Majalah	Jenis	20	4	4	100	4

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2018-2023				
				Target Akhir Renstra (2023)	Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	Jenis	50	11	11	100	11
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kali	351	88	88	100	235
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kali	1340	336	336	100	64
(2)	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatkan Kapabilitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan DPMPPTSP (Persentase Sarana dan Prasarana yang Memadai)</b>						
1	Pengadaan Software dan Hardware Komputer	Hardware Komputer	Jenis	15	0	0	0	3
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional	Liter	17934	3414	3414	100	3450
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Gedung Kantor DPMPPTSP Kota Prabumulih	Jenis	20	4	4	100	4
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware/Software/Jaringan Komputer	Peralatan Hardware, Software dan Jaringan Komputer	Jenis	13	2	2	100	1
5	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	Informasi Pelayanan Perizinan	Orang	5	1	1	100	1
6	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis	59	0	0	0	15

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2018-2023				
				Target Akhir Renstra (2023)	Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi
(3)	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatkan Kapabilitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan DPMPTSP (Persentase Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Aparatur)</b>						
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Setel	290	60	60	100	64
2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Olahraga	Setel	290	64	64	100	64
(4)	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Meningkatkan Kapabilitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan DPMPTSP (Persentase Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur)</b>						
1	Peningkatan Kinerja Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Kinerja Pelayanan dan Terciptanya Layanan Perizinan yang Prima	Orang	96	18	18	100	18
(5)	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Meningkatkan Kapabilitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan DPMPTSP (Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD yang disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi)</b>						
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP DPMPTSP	Dokumen	5	1	1	100	1
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semester yang Tepat	Dokumen	5	1	1	100	1

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2018-2023				
				Target Akhir Renstra (2023)	Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tepat	Dokumen	5	1	1	100	1
4	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKA	Dokumen	5	1	1	100	1
5	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD Perubahan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen RKA Perubahan	Dokumen	5	1	1	100	1
6	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (RENJA)	Dokumen	5	1	1	100	1
7	Penyusunan LPPD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen LPPD	Dokumen	5	1	1	100	1
(6)	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Meningkatkan Kapabilitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan DPMP TSP (Persentase Jumlah Promosi/Kerjasama Investasi yang diikuti)</b>						
1	Pembuatan/Pencetakan Booklet dan Leaflet dan Paper Bag	Penyebaran Potensi Daerah Melalui Booklet & Leaflet	Jenis	16	3	3	100	3
(7)	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>Meningkatkan Kapabilitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan DPMP TSP (Persentase Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi)</b>						
1	Pendataan Pemberdayaan Usaha di Kota Prabumulih	Data Pemberdayaan Usaha di Kota Prabumulih	Dokumen	6	1	1	100	1

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2018-2023				
				Target Akhir Renstra (2023)	Tahun 2020		Tahun 2021	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi
<b>(8)</b>	<b>Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</b>	<b>Meningkatkan Kapabilitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan DPMP TSP (Persentase Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan)</b>						
1	Pembinaan Kewajiban Perusahaan Penanaman Modal di Kota Prabumulih	Meningkatnya Jumlah Perusahaan yang Menanamkan Modalnya di Kota Prabumulih	Perusahaan	130	10	10	100	20
2	Penyusunan dan Pengelolaan Data Informasi Penanaman Modal di Kota Prabumulih	Tercapainya Informasi Database Perizinan dan Non Perizinan yang Akurat dan Terintegrasi	Dokumen	4	1	1	100	1
3	Pemantauan dan Pengawasan PMDN dan PMA di Kota Prabumulih	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal yang terpantau di Wilayah Kota Prabumulih	Laporan	16	4	4	100	4
<b>(9)</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Umum Perizinan</b>	<b>Meningkatkan Kapabilitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan DPMP TSP (Persentase Peningkatan Pelayanan Umum Perizinan)</b>						
1	Fasilitasi Pelaksanaan dan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Data Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan	8	2	2	100	2
	Fasilitasi Pelayanan Pengaduan Pelanggan/Masyarakat	Terlaksananya Tindaklanjut Laporan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perizinan	Dokumen	4	1	1	100	1
	Pembinaan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan	Terpenuhinya Fasilitasi Tim Teknis dan Tim Pembina Perizinan	Orang	260	24	24	100	26
4	Penyusunan dan Pembuatan Buku SOP dan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya Pencetakan Buku SOP dan SP	Buku	400	80	80	100	100

## **Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih merupakan OPD yang mengemban amanah masyarakat Kota Prabumulih dalam hal Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, mempunyai indikator kinerja untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan/ditargetkan.

Pengukuran kinerja DPMPTSP Kota Prabumulih dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP. Pengukuran kinerja mencakup pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan yang selanjutnya dilakukan evaluasi agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Berikut adalah analisis kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2020.

1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dikeluarkan oleh Inspektorat dengan melakukan evaluasi terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja OPD. Evaluasi dilakukan terhadap dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja OPD. Pada tahun 2019 yang lalu hasil evaluasi DPMPTSP Kota Prabumulih memperoleh nilai sebesar 59,30 dengan kategori CC masuk dalam interpretasi Cukup (Memadai) dan sesuai target yang telah ditetapkan, yang berarti Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. Untuk tahun 2020 ini target nilai SAKIP DPMPTSP adalah **“B”** tetapi untuk hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja DPMPTSP TA. 2020, **belum dilakukan evaluasi** oleh Inspektorat sampai dengan bulan Februari 2021.

2. Audit tim Inspektorat Kota Prabumulih berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Kota Prabumulih Nomor: 700/130/Inspektorat/2020 tanggal 22 Juni 2020 perihal Melakukan Audit Kepatuhan Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020, yang dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 26 Juni 2020 di Kantor DPMPTSP Kota Prabumulih terdapat temuan sebagai berikut:

- 1) **Pada saat Audit Kepatuhan Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari beberapa sampel pembuatan IMB yang tidak sesuai dengan SOP/melampaui batas waktu pembuatan IMB yang telah ditentukan selama 14 hari. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 47 Tahun 2019 tentang 23 Mei 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan non Perizinan pada DPMPTSP Kota Prabumulih**
- 2) **Pada saat audit Kepatuhan pada DPMPTSP Kota Prabumulih terdapat Tim Teknis yang tidak berada ditempat kerja. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 55/KPTS/DPMPTSP/2020 tentang pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Kota Prabumulih huruf a yang berbunyi “Setiap anggota Tim Teknis untuk melakukan absensi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih”.**

Adapun audit dari tim inspektorat tersebut telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Atas Hasil Audit Kepatuhan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2020 yang disampaikan pada tanggal 03 Agustus 2020, dengan jawaban sebagai berikut:

- 1) Temuan Pertama

**Sebab**

Tim Teknis dari PUPR Kota Prabumulih sebagai pejabat yang diberi tanggungjawab tidak melaksanakan tugas teknis sesuai dengan waktu yang diatur SOP, sehingga rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR terlambat diterima oleh DPMPTSP.

**Akibat**

Terjadi keterlambatan pembuatan IMB dari batas waktu yang telah ditentukan

### **Komentar pejabat yang diperiksa**

Setuju dengan hasil temuan tersebut dengan Penjelasan bahwa berkas permohonan penerbitan IMB yang masuk ke DPMPTSP diperiksa dengan teliti apabila sudah lengkap sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan maka berkas langsung diteruskan ke Dinas PUPR melalui Tim Teknis, SOP di DPMPTSP pembuatan IMB telah sesuai SOP adalah selama 14 hari kerja, tetapi kenyataannya tidak pernah sesuai jadwal karena keterlambatan kembalinya berkas beserta Surat Rekomendasi dari Dinas PUPR sebagai dasar Penerbitan IMB.

### **Rekomendasi**

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih agar segera memerintahkan kepada Tim Teknis Pembuatan IMB untuk mematuhi SOP yang sudah ditentukan. Segera memerintahkan kepada anggota Tim Teknis agar mematuhi jam kerja yang sudah ditentukan.

#### 2) Temuan Kedua

### **Sebab**

Kepala DPMPTSP Kota Prabumulih sebagai pejabat yang diberi tanggungjawab tidak melaksanakan peraturan yang berlaku.

### **Akibat**

Tim Teknis sebagai pejabat yang diberi tanggung jawab tidak berada di DPMPTSP

### **Komentar pejabat yang diperiksa**

Setuju dengan hasil temuan dengan penjelasan:

- a. Pada saat dilaksanakan Audit Kepatuhan memang Tim Teknis tidak berada diruang kerja Tim Teknis DPMPTSP karena sebagian besar Tim Teknis yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor: 55/KPTS/DPMPTSP/2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan sebagian besar adalah pejabat struktural setingkat eselon IV di OPD teknis sehingga mereka tidak berada *standby* di DPMPTSP, hal ini dikarenakan oleh keterbatasan jumlah staf pelaksana yang menguasai secara teknis tentang perizinan di OPD teknis.

- b. Sebagian besar Tim Teknis yang ada melakukan Pemeriksaan lapangan atau lokasi permohonan izin yang diajukan pemohon.
- c. Kondisi Perkantoran saat ini belum normal karena masih dalam suasana Pandemi Covid-19.
- d. Walaupun di dalam kondisi Pandemi Covid-19 layanan perizinan berjalan dengan baik dengan menggunakan metode *On Call* kepada Tim Teknis, sehingga pemohon tidak mengalami hambatan dalam mengajukan Permohonan Izin.

### **Rekomendasi**

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih agar Segera memerintahkan kepada anggota Tim Teknis untuk mematuhi jam kerja yang sudah ditentukan.

- 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih melaksanakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat 2 (dua) periode selama tahun 2020, yaitu pada **Semester Pertama** dilaksanakan pada bulan Januari s.d Juni 2020 dan **Semester Kedua** pada bulan Juli s.d Desember 2020. Sebagai dasar hukum kegiatan survey ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Variabel penelitian yang digunakan dalam survei kepuasan masyarakat ini terdiri dari 9 (sembilan) variabel, yaitu: persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu/kecepatan pelayanan, biaya/tarif, kesesuaian produk layanan, kompetensi pelaksana layanan, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan serta sarana dan prasarana.

- **Survey Semester Pertama (Periode Januari – Juni 2020)**

Responden untuk Survey Kepuasan Masyarakat ini adalah Pelanggan atau Masyarakat Pembuat Izin pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Terdiri dari 100 sampai 200 Orang Responden yang dipilih secara acak/random pada saat pengguna izin mengambil izin yang sudah selesai. Lokasi

dari Pengumpulan data sendiri dilakukan pada *Front Office* loket 4. Berdasarkan Hasil Nilai Indeks Unit Pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Prabumulih semester 1 tahun 2020 diperoleh hasil, **Nilai IKM 84.58** yang memiliki Mutu Pelayanan “B”, serta Kinerja Unit Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih semester 1 tahun 2020 adalah ” BAIK“. Survei Kepuasan Masyarakat semester 1 ini dilaksanakan di tengah pandemi covid-19. Walaupun demikian survei tetap dijalankan dengan keterbatasan sehingga hanya 90 responden yang bisa mengisi kuesioner.

- **Survey Semester Kedua (Periode Juli – Desember 2020)**

Berdasarkan Hasil Nilai Indeks Unit Pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Prabumulih Semester II tahun 2020 diperoleh hasil, Nilai **IKM 84.6** dengan **Mutu Pelayanan “B”**, serta Kinerja Unit Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih semester II tahun 2020 adalah ” BAIK“.

Jadi, nilai IKM DPMPTSP Tahun 2020 adalah jumlah nilai rata-rata IKM Semester 1 dan Semester 2, maka didapat nilai **IKM Tahun 2020 adalah 84,59 dengan Mutu Layanan “B”**. Nilai ini melebihi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 84.

Tabel 2.3 Nilai IKM DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2020.

Tahun	Semester 1		Semester 2		Rata-Rata Thn 2020	
	Nilai IKM	Mutu Layanan	Nilai IKM	Mutu Layanan	Nilai IKM	Mutu Layanan
2020	84,58	B	84,60	B	<b>84,59</b>	<b>B</b>

Sumber: Laporan SKM DPMPTSP Kota Prabumulih Th.2020

4. Berdasarkan Renstra DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2018-2023, DPMPTSP pada tahun 2020 mempunyai target investasi sebesar Rp50.000.000.000,. (lima puluh milyar rupiah), sementara berdasarkan target BKPM RI, DPMPTSP Kota Prabumulih dibebankan target investasi sebesar Rp130.000.000.000,. (seratus tiga puluh milyar rupiah). **Realisasi Investasi Kota Prabumulih Tahun 2020 Rp340.496.356.836,- (Tiga Ratus Empat Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)**. Dari data

tersebut DPMPTSP telah mampu melampaui target yang ditentukan diatas, dengan pencapaian persentase sebesar 261,8% dari target yang telah ditentukan BKPM-RI.

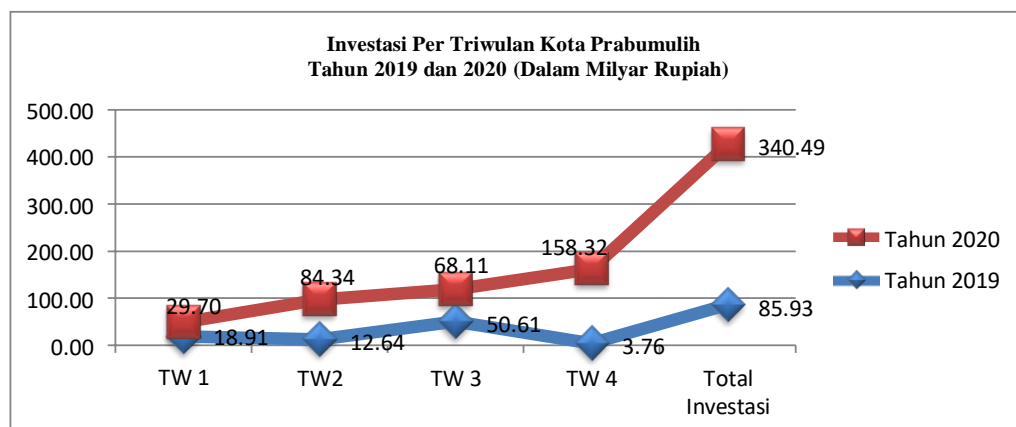
Secara matematis, pencapaian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{ii i vstsi hu 2020} &= \frac{\text{ii issi vstsi hu 2020}}{\text{ii rgt vstsi hu 2020}} \cdot 100 \\
 &= \frac{340.496.356.836}{130.000.000.000} \cdot 100 \\
 &= 261,8 \%
 \end{aligned}$$

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala (Pasal 1 angka (41) Peraturan BKPM No. 7 Tahun 2018). LKPM ini disampaikan setiap triwulan bagi perusahaan yang sedang dalam proses pembangunan atau belum berproduksi, dan laporan semester wajib bagi perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi. Pelaku usaha wajib melaporkan seluruh kegiatan penanaman modalnya melalui *aplikasi LKPM online*.

DPMPTSP Kota Prabumulih sebagai instansi yang membidangi penanaman modal Kota Prabumulih melaksanakan kegiatan pemantauan investasi di Kota Prabumulih secara rutin melalui LKPM online, dan didapatkan data total nilai realisasi investasi di Kota Prabumulih tahun 2020 sebesar **Rp340.496.356.836,-** (**Tiga Ratus Empat Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah**). Adapun data investasi per triwulan tahun 2019 dan 2020 disajikan pada grafik di bawah.

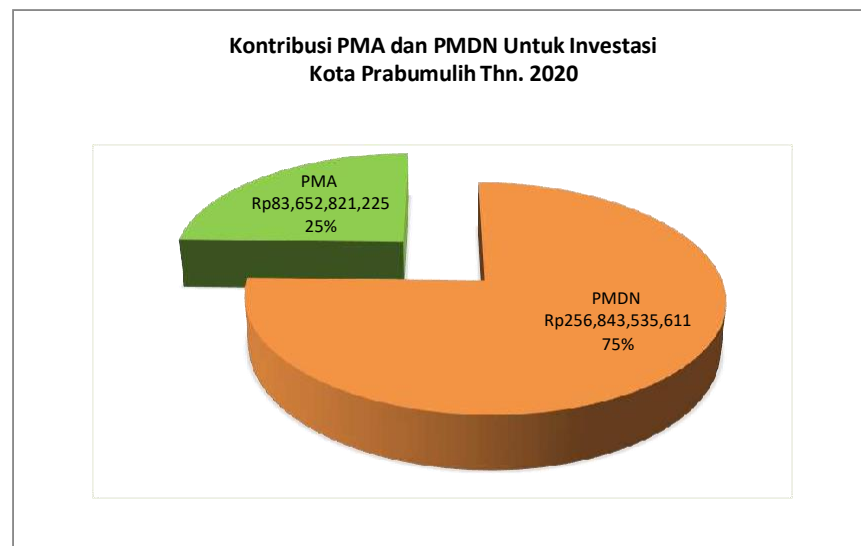
Gambar 2.1 Grafik Investasi Per Triwulan Tahun 2019 dan 2020 Kota Prabumulih



Sumber : LKPM Online

Berdasarkan grafik di atas, total **nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp85.936.833.821** dan terjadi kenaikan total **nilai investasi di tahun 2020 sebesar Rp340.496.356.836**. Nilai investasi di Kota Prabumulih tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 296,8% (*year-on-year*), dimana kenaikan nilai investasi di Kota Prabumulih yang cukup signifikan dikarenakan adanya kegiatan penanaman modal dari Perusahaan Perseroan PT. Utama Karya yang sedang melaksanakan pembangunan ruas jalan tol Inderalaya- Muara Enim yang melewati Kota Prabumulih dengan nilai investasi mencapai Rp255,3 Milyar. Selanjutnya dilihat dari nilai per triwulan dari tahun 2019 ke 2020 juga mengalami peningkatan nilai investasi dari triwulan 1 sampai triwulan 3 dengan nilai rata-rata sebesar 219,63%. Kenaikan yang sangat tinggi dilihat dari triwulan 4 dengan pertumbuhan lebih dari 4000% (*q-to-q*). Berdasarkan jenisnya, realisasi investasi penanaman modal dibagi 2 yaitu: Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berikut besaran kontribusi PMA dan PMDN atas nilai total investasi Kota Prabumulih tahun 2020.

Gambar 2.2 Grafik PMA dan PMDN Kota Prabumulih Tahun 2020

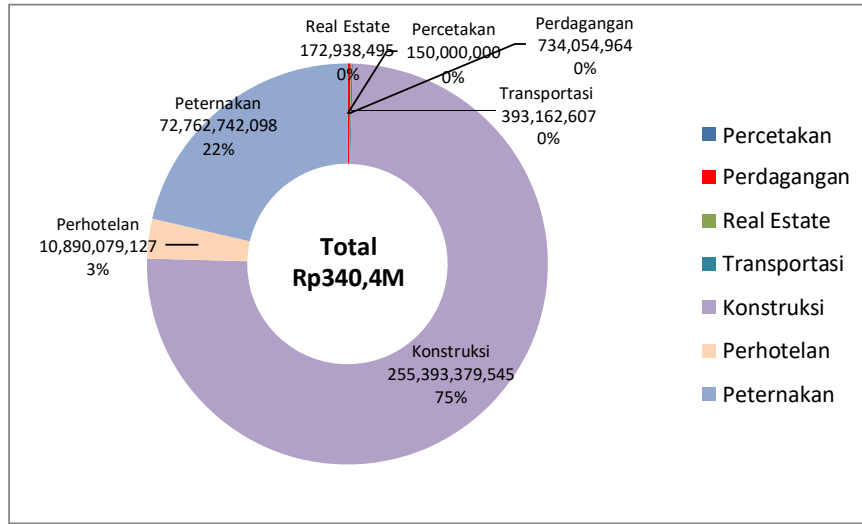


Sumber: *LKPM Online 2020*, diolah

Berdasarkan grafik di atas, realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki kontribusi dominan dengan total nilai investasi sebesar Rp256.8 milyar (75%) dibandingkan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp83,6 milyar (25%) sepanjang tahun 2020. Realisasi investasi PMA di Kota Prabumulih

berasal dari investor negara Belanda (Sektor Perhotelan), Malaysia (Sektor Peternakan) dan Singapore (Sektor Konstruksi). Selanjutnya, berdasarkan laporan penanaman modal per sektor untuk lebih lengkap dapat dilihat pada grafik berikut:

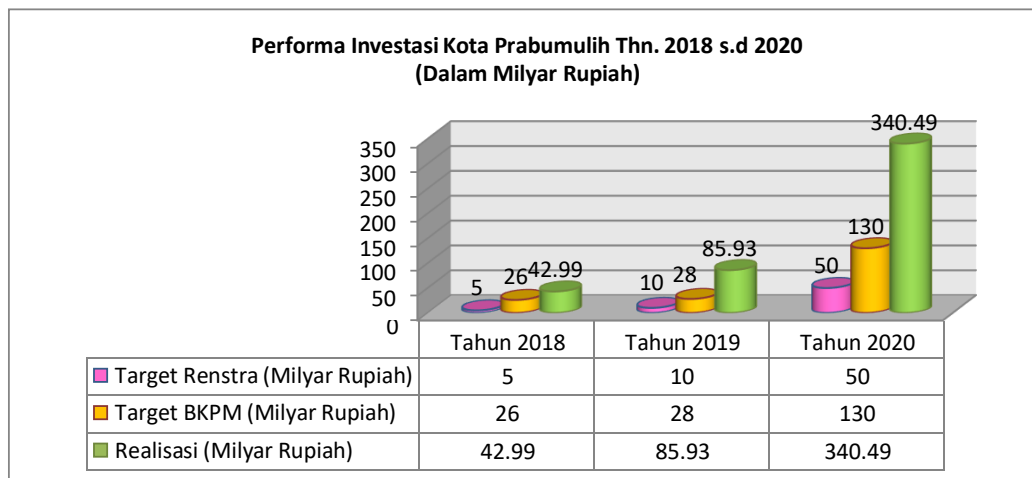
Gambar 2.3 Grafik Per Sektor Investasi Kota Prabumulih



Sumber: LKPM Online 2020, diolah

Berdasarkan grafik di atas, investasi di **sektor konstruksi berkontribusi terbesar** dibanding sektor lainnya yaitu sebesar Rp255,3 milyar (75%) , dan terbesar kedua pada sektor peternakan sebesar Rp72,7 milyar (22%) dan terbesar ketiga adalah sektor perhotelan sebesar Rp10.8 milyar (3%). Untuk performa investasi Kota Prabumulih dari tahun 2017 sampai 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.4 Grafik Investasi Kota Prabumulih Tahun 2018 s.d 2020

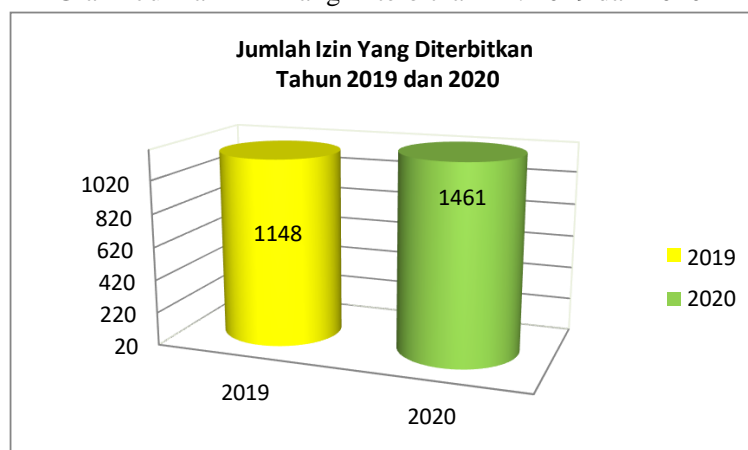


Sumber: Data LKPM Online

Salah satu tujuan strategis DPMPTSP Kota Prabumulih selain meningkatnya tata kelola dan kualitas pelayanan publik adalah **meningkatnya realisasi investasi penanaman modal di Kota Prabumulih**. Setiap tahun target investasi Kota Prabumulih ditentukan oleh BKPM RI melalui DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan target investasi Renstra sudah ditentukan pada awal pembuatan Renstra DPMPTSP 2018-2023. Dari grafik di atas, realisasi investasi kota Prabumulih dari tahun 2018 sampai 2020 melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2020, target yang ditentukan oleh BKPM adalah sebesar Rp130 Milyar dan nilai realisasinya sebesar Rp340,4 Milyar atau persentase pencapaiannya sebesar 261,8% dari target yang telah ditentukan.

5. Dalam era digitalisasi ini, bidang perizinan DPMPTSP Kota Prabumulih telah menerapkan sistem Tanda Tangan Elektronik/TTE (*Digital Signature*) dalam dokumen dinas perizinan usaha sejak tahun 2019, dengan menggunakan TTE ini artinya DPMPTSP Kota Prabumulih telah melaksanakan tujuan strategis dari *e-government* yaitu menata sistem manajemen dan proses kerja secara holistik serta memanfaatkan teknologi secara optimal. Adapun jumlah izin yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Prabumulih dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2.5  
Grafik Jumlah Izin Yang Diterbitkan Th. 2019 dan 2020

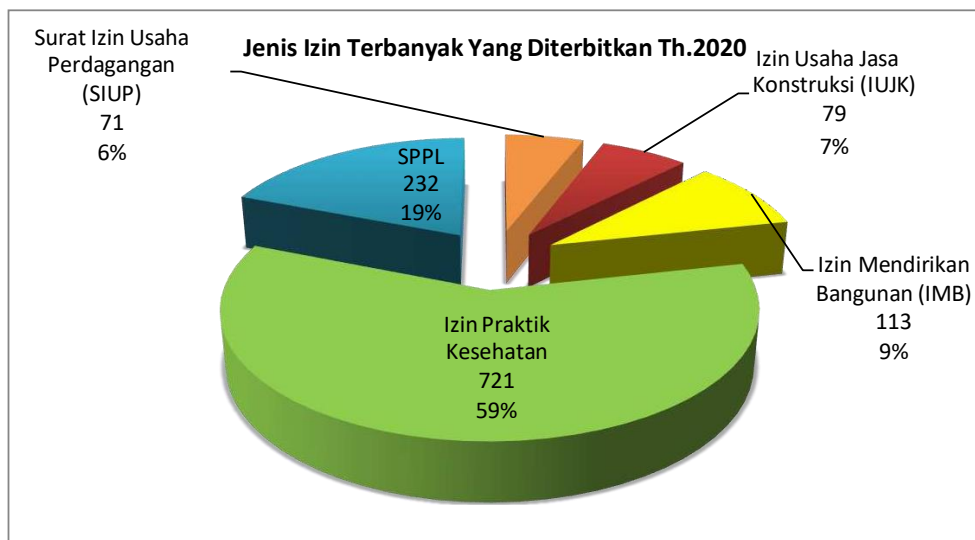


Sumber: Bidang Perizinan, DPMPTSP Kota Prabumulih

Pada grafik di atas, jumlah izin yang diterbitkan DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2020 adalah sebanyak **1461 izin**, dan terjadi kenaikan jumlah izin yang diterbitkan

sebesar 27,2% jika dibandingkan dengan tahun 2019. (Data lengkap perizinan yang diterbitkan dapat dilihat pada lampiran). Layanan Perizinan di masa pandemi tetap optimal beroperasi dengan menerapkan proktokol kesehatan bagi yang datang langsung ke kantor DPMPTSP dan bagi yang masyarakat berkendala untuk datang ke kantor atau yang akan mengurus perizinan secara *online* dapat menggunakan layanan sistem *Online Single Submission* (OSS) atau perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Dari 29 (dua puluh sembilan) jenis izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2020, berikut 5 jenis izin terbanyak yang diterbitkan dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.6 Jenis Izin Terbanyak Yang Diterbitkan Tahun 2020



Sumber: Bidang Perizinan dan Bidang Pengolahan Data Informasi, diolah

6. DPMPTSP Kota Prabumulih mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan. Dalam pelaksanaannya, DPMPTSP Kota Prabumulih bersinergi dengan berbagai lembaga vertikal guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk kerjasama ini adalah **Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)** yaitu program sinergi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan DPMPTSP Kota Prabumulih, dimana kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak. Bentuk sinerginya berupa

terintegrasinya layanan perizinan dengan aplikasi KSWP guna mewujudkan keseimbangan antara perolehan hak dan pemenuhan kewajiban setiap warga negara Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu asas pelayanan publik adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sehingga penerapan KSWP sebagai salah satu prasyarat masyarakat pemohon izin untuk memperoleh pelayanan perizinan dapat mendorong keseimbangan antara perolehan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pada tanggal 14 Oktober 2020, **Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung** selaku Pembina Tim Implementasi KSWP telah memberikan **Apresiasi dan Penghargaan kepada DPMPTSP Kota Prabumulih sebagai instansi yang telah menjalankan Implementasi KSWP di tingkat Pemerintah Daerah dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 secara maksimal.**

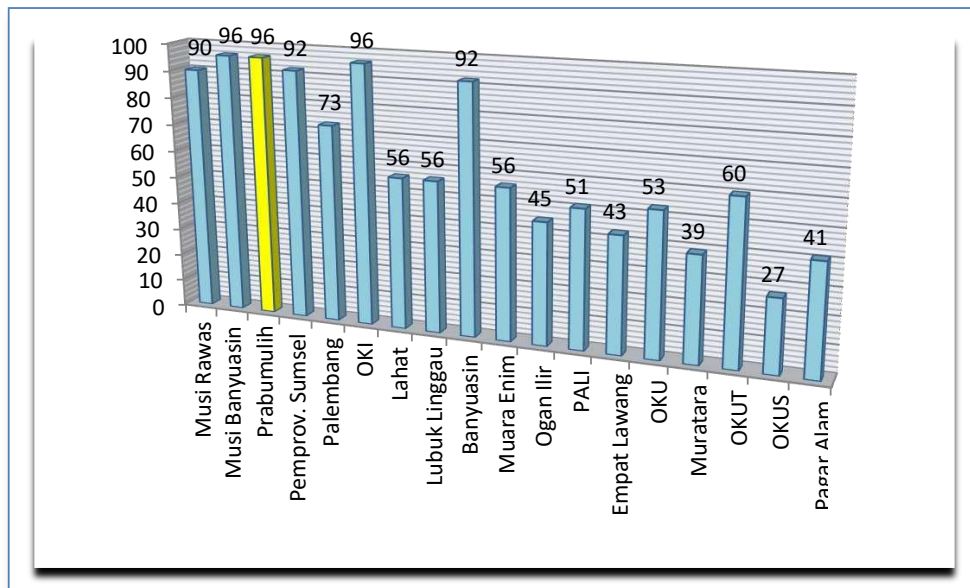
Gambar 2.7 Piagam Penghargaan KSWP



7. Dalam melaksanakan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Pemerintah Pusat melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI membuat terobosan dalam pencegahan korupsi di daerah melalui *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi dengan 8 (delapan) area intervensi. Area intervensi inilah yang dinilai dengan pengumpulan dokumen sebagai bahan yang akan diverifikasi oleh PIC Korsupgah KPK masing-masing daerah. Kepatuhan dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan, DPMPTSP menjadi salah satu dari 8 (delapan) area intervensi KORSUPGAH KPK, dimana progres tindak lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi yang dilakukan pada Area Intervensi

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan tanggal 22 Januari 2021 telah final diverifikasi oleh KPK dan DPMPTSP **mendapat nilai 96% (tertinggi di Prov. Sumatera Selatan)**. Pencapaian ini berhubungan erat dengan hasil evaluasi Ombudsman RI tahun 2019, dimana DPMPTSP mendapat predikat **Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik** untuk Pemerintah Kabupaten dan Kota. Kedua pencapaian ini menunjukkan bahwa Kinerja DPMPTSP Kota Prabumulih sangat tinggi. Pencapaian hasil MCP Korsupgah area intervensi PTSP pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 2.8 Grafik Capaian kinerja Korsupgah KPK Wilayah Sumatera Selatan Th.2020



Sumber: [jaga.id/Data](http://jaga.id/Data) Korsupgah Tahun 2020/Admin Pemda (Inspektorat), Data diolah

Berdasarkan grafik di atas, **Kota Prabumulih**, Kab. Musi Banyuasin dan Kab. OKI mencapai **nilai tertinggi (rangking pertama)** untuk Capaian Kinerja Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (korsupgah) KPK Tahun 2020 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan untuk area intervensi pelayanan terpadu satu pintu dengan nilai 96%.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai Target/Standar (IKU/SPM/IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP	Predikat	CC	<b>B</b>	B	BB	A	CC	-	BB	A	<i>Nilai SAKIP Tahun 2020 Belum dikeluarkan oleh Inspektorat sebagai Tim Evaluator SAKIP</i>
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Persen (%)	100	<b>100</b>	100	100	100	100	<b>100</b>	100	100	
3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	84	<b>84</b>	88	88	88	85,4	<b>84,5</b>	88	88,4	
4	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN)	Milyar	10	<b>50</b>	75	100	125	Rp85,9 Milyar	<b>Rp340,4 Milyar</b>	Rp220 Milyar	Rp300 Milyar	

## **Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal di Kota Prabumulih dengan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu: meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan DPMPTSP, meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan/non perizinan dan meningkatkan nilai investasi di Kota Prabumulih.

Sejauh ini kinerja pengelolaan di DPMPTSP Kota Prabumulih masih perlu terus dioptimalkan, sehingga penyelenggaraan penanaman modal yang berkelanjutan dan pelayanan terpadu satu pintu dapat menjadi lebih baik.

Salah satu isu penting yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Prabumulih sampai saat ini adalah belum adanya Cetak Biru (*Masterplan*) Peta Potensi Investasi Kota Prabumulih yang menjadi sumber data spasial potensi investasi yang terintegrasi dengan basis data potensi sumber daya lainnya. Peta potensi ini dapat memberi kemudahan bagi calon investor untuk menemukan potensi Kota Prabumulih berdasarkan data dan informasi yang valid. Selain belum tersedianya *masterplan* kota Prabumulih, masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan lainnya seperti:

1. Belum tercukupinya kebutuhan Sumber Daya Aparatur yang kompeten sehingga berdampak pada kinerja aparatur yang belum efektif;
2. Belum adanya kebijakan daerah tentang pemberian insentif/kemudahan berinvestasi di Kota Prabumulih;
3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal;
4. Promosi penanaman modal belum optimal dalam menarik investasi di Kota Prabumulih;
5. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal masih terbatas dan belum mutakhirnya data informasi penanaman modal kota Parbumulih
6. Pendidikan dan Pelatihan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu masih sangat terbatas dan belum optimal.

Dari beberapa permasalahan diatas, tentunya akan berdampak pada penacapaian visi misi Walikota Prabumulih dimana salah satu visi Walikota Prabumulih pada poin (4) adalah

“Pemberdayaan Masyarakat dengan menciptakan seluas-luasnya kesempatan kerja/berusaha, serta dengan memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan ekonomi kreatif”. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dengan tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan aspek-aspek terkait dengan peningkatan investasi dan pelayanan perizinan di Kota Prabumulih. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan investasi daerah.

Adapun Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan OPD yaitu :

**A. Faktor Kekuatan:**

1. Telah ditetapkannya Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Prabumulih Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Atas Nama Walikota;
2. Adanya standar operasional prosedur untuk tiap-tiap perizinan sebagai pedoman/petunjuk prosedural yang jelas dan transparan berkaitan dengan perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP;
3. Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Prabumulih;
4. Pelayanan perizinan di bidang penanaman modal telah menggunakan SiCantik Cloud dan OSS

**B. Faktor Kelemahan :**

1. Belum memadainya prasarana gedung kantor;
2. Kompetensi dan kualitas Sumber Daya Aparatur masih terbatas;

3. Belum memadainya jumlah tenaga teknis bidang perizinan;
4. Belum tersedianya data potensi dan peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor baru;
5. Belum optimalnya penggunaan sistem pelayanan perizinan terpadu.

**C. Faktor Peluang:**

1. Sistem birokrasi pemerintah Kota Prabumulih yang sudah mulai tertata dengan baik;
2. Tersedianya sarana media cetak, elektronik dan website yang memudahkan penyebaran informasi;
3. Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara OPD Teknis dan DPMPTSP.

**D. Faktor ancaman**

1. Regulasi perizinan yang sering mengalami perbaikan sejalan dengan adanya peraturan baru;
2. tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
3. semakin meningkatnya kontrol dan pengawasan dari berbagai elemen masyarakat;
4. perkembangan teknologi informasi.

**Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan masyarakat untuk tahun 2022 ini kami peroleh dari masukan tim Evaluator BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan pada bulan Agustus 2020. Hasil pemeriksaan tersebut, tim evaluator memberikan rekomendasi agar mengalihkan Sistem Informasi Perizinan yang berbayar (SIPEPERMULIH) ke aplikasi Sistem Informasi Pemerintah yang tidak berbayar aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu (SiCantik *Cloud*) serta meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di DPMPTSP.

Menanggapi rekomendasi tersebut, dalam hal kualitas pelayanan perizinan berbasis elektronik, DPMPTSP Kota Prabumulih mulai tahun 2021 sudah menggunakan aplikasi SiCantik *Cloud* secara penuh dan meninggalkan aplikasi SIPEPERMULIH yang bersifat

*Offline* dan berbayar. DPMPTSP juga membangun *website* yang dimulai pada tahun 2021 secara bertahap, akan terus dikembangkan di tahun 2022 dan seterusnya. Hal ini dikarenakan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang baik dan memuaskan masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digitalisasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi DPMPTSP Kota Prabumulih untuk membuat perencanaan khusus dalam hal **Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.**

DPMPTSP telah berusaha meningkatkan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik dengan cara:

1. DPMPTSP terus melakukan pengembangan/*upgrade* sistem aplikasi pelayanan berbasis IT;
2. Optimalisasi pelayanan perizinan dan informasi perizinan menggunakan SiCantik dan *Online Single Submission* (OSS) dapat dibantu secara *offline* dengan datang langsung ke DPMPTSP (*OSS Lounge Lantai 2*) atau secara *online* via telepon dengan menghubungi tim admin atau operator pendamping OSS.

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan perencanaan pelayanan terpadu satu pintu, maupun yang dirumuskan dalam RKP (Rancangan Awal) disesuaikan dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 tentang RKPD 2018, maka perumusan kegiatan dalam RKPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut yang disajikan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Substansi Kegiatan Sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2017**

No.	Substansi Kegiatan Sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2017	Diakomodir Dalam RKPD 2022
1	PSTP Provinsi dan Kabupaten/Kota serta KEK dan FTZ yang terhubung dengan SPIPISE dan <i>tracking system</i> (Implementasi SPIPISE)	✓
2	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal	✓
3	Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan persetujuan penanaman modal	✓
4	Standar Operating Procedure (SOP) pelayanan perizinan penanaman modal	✓
5	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) kepada provinsi dan kabupaten/kota	✓
6	Fasilitasi penyelesaian masalah	✓

**TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

**Tujuan**

Tujuan OPD merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan berpedoman kepada pernyataan visi dan misi Walikota Prabumulih serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah sebagai berikut :

**1. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP Kota Prabumulih**

**2. Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kota Prabumulih**  
**Sasaran Strategis**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan DPMPTSP Kota Prabumulih
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Meningkatnya Realisasi Investasi

Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja DPMPTSP Tahun 2022

No.	Sasaran Renstra	Indikator	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan DPMPTSP Kota Prabumulih	Nilai SAKIP	SAKIP	Nilai akuntabilitas kinerja berupa peringkat/predikat dalam mengidentifikasi kemampuan OPD perihal merencanakan, menyelaraskan, dan melaporkan capaian kinerja
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	LAKIP Laporan Keuangan	
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	<b>Nilai SKM</b> = Nilai Indeks x Nilai Dasar SKM (25)
3.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah Investasi PMDN dan PMA	Data Jumlah Investasi Berskala Nasional di Kota Prabumulih	Jumlah Investasi PMDN dan PMA di Kota Prabumulih

**KONVERSI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019**

Kode Program	Program	Hasil Program / Outcome	Kode Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023									
				Kegiatan	Kode Sub Kegiatan				Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pengelolaan Urusan Pemerintahan Daerah (Meliputi Sarana dan Prasarana, Personil, Metode Kerja, Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Penganggaran, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan, Standarisasi, dan Pengelolaan Informasi)	x.xx.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X	XX	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) DPMPPTSP	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000					
											3. Jumlah Data Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPMPPTSP	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000					
										X	XX	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000
										X	XX	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000
										X	XX	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPMPPTSP	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000
										X	XX	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) DPMPPTSP	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X	XX	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN DPMPPTSP dalam 1 Tahun	1 Tahun	5,075,157,329	1 Tahun	5,582,673,062
					X	XX	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa Administrasi Keuangan DPMPPTSP	7 Orang	42,000,000	7 Orang	42,000,000
					X	XX	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun DPMPPTSP	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000
					X	XX	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semester DPMPPTSP	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	15,000,000
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	X	XX	1	2	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jasa Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada DPMPPTSP	2 Orang	10,800,000	2 Orang	10,800,000
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X	XX	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya	64 Stel	40,000,000	64 Stel	45,000,000
					X	XX	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Jumlah Peserta yang Mengikuti Kemampuan dan Pengetahuan Sumber Daya Aparatur ASN melalui Diklat Tentang Perizinan	12 Orang	90,000,000	12 Orang	90,000,000

											2. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengetahuan dan Kinerja Aparatur Pelayanan melalui <i>Excellent Frontline Services</i> .	15 Orang	50,000,000	15 Orang	70,000,000
											3. Jumlah Peserta yang Mengikuti Audit Eksternal Lanjutan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dalam rangka meningkatkan Kualitas layanan dan kinerja ASN /karyawan DPMPPTSP.	64 Orang	65,000,000	64 Orang	70,000,000
											4. Jumlah Sumber Daya Aparatur Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang mengikuti Diklat BKPM RI	4 Orang	50,000,000	4 Orang	60,000,000
											5. Jumlah Peserta yang Mengikuti <i>In House Training</i> dalam Rangka Penerapan Mutu Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal bagi Aparatur DPMPPTSP	64 Orang	100,000,000	64 Orang	100,000,000
											6. <i>Coaching Clinic</i> Penilaian Ombudsman Untuk Pelayanan Perizinan	64 Orang	70,000,000	64 Orang	80,000,000

					X	XX	1	2	#	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1. Jumlah Peserta yang Mengikuti <i>Public Hearing</i> Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Kepada Tokoh Masyarakat, Akademisi, LSM, Aparatur Pemerintah dan Dunia Usaha/Masyarakat Pengguna Izin di Kota Prabumulih.	75 Orang	75,000,000	75 Orang	75,000,000
											2. Jumlah Peserta yang Mengikuti Penyuluhan dan Advokasi Pelayanan Pengurusan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi Masyarakat Kota Prabumulih.	50 Orang	35,000,000	50 Orang	50,000,000
											3. Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Perizinan Berusaha (NIB) Sektor UMKD terintegrasi dengan siCantik Cloud di 6 Kecamatan se-Kota Prabumulih.	150 Orang	80,000,000	150 Orang	100,000,000
											4. Jumlah Peserta yang Mengikuti Disiplin dan Kemampuan Pegawai Melalui Pemberian Reward dan Funishmant	32 Orang	40,000,000	32 Orang	50,000,000

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	X	XX	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis kebutuhan alat-alat listrik untuk penerangan dan jaringan listrik	11 Jenis	10,000,000	11 Jenis	10,000,000
					X	XX	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis kebersihan kantor dan tersedianya kebutuhan pendukung kebersihan kantor	26 Jenis	20,000,000	26 Jenis	20,000,000
					X	XX	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis makanan dan minuman rapat dan tamu	10 Jenis	30,000,000	10 Jenis	30,000,000
					X	XX	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	8 Jenis	60,000,000	8 Jenis	70,000,000
					X	XX	1	2	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Jumlah Jenis Surat Kabar atau Media Massa dalam 1 tahun	4 Jenis	20,000,000	4 Jenis	20,000,000
											2. Jumlah Buku Kumpulan Peraturan Mengenai Perizinan dan Penanaman Modal	100 Buku	20,000,000	150 Buku	30,000,000
											3. Jumlah Buku Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur DPMPTSP	100 Buku	20,000,000	150 Buku	30,000,000
					X	XX	1	2	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat tulis kantor yang Tersedia dalam 1 Tahun	52 Jenis	60,000,000	52 Jenis	60,000,000

					X	XX	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam 1 tahun	230 Kali	300,000,000		350,000,000
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X	XX	1	2	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Mobil	250,000,000	1 Mobil	250,000,000
					X	XX	1	2	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	5 Jenis	50,000,000	5 Jenis	50,000,000
					X	XX	1	2	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	5 Jenis	50,000,000	5 Jenis	60,000,000
					X	XX	1	2	9	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Jenis	50,000,000	5 Jenis	50,000,000
					X	XX	1	2	#	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Jenis	50,000,000	5 Jenis	50,000,000
					X	XX	1	2	#	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Jenis	50,000,000	5 Jenis	50,000,000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X	XX	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat-menyerurat (materai dan benda pos lainnya)	2 Jenis	5,000,000	2 Jenis	5,000,000

					X	XX	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Layanan Telepon, Internet dan Listrik dalam 1 tahun	2 Rekening (24 rekening)	100,000,000	2 Rekening (24 rekening)	100,000,000
					X	XX	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	4 Jenis	30,000,000	5 Jenis	40,000,000
										Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	3 Jenis	30,000,000	3 Jenis	30,000,000	
					X	XX	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan Kantor DPMPSTP dalam 1 Tahun	7 Orang	54,000,000	7 Orang	54,000,000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X	XX	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (STNK)	7 STNK	6,000,000	7 STNK	6,000,000
										Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (BBM, Servis, Sperpart, DLL)	4.840 Liter	85,000,000	4.840 Liter	85,000,000	
					X	XX	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Jenis	50,000,000	4 Jenis	50,000,000
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	<b>2.18.02.2.02</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	2	18	2	2	2	<b>Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</b>	1. Pendataan UMKM di Kecamatan-Kecamatan di Kota Prabumulih	2 Kecamatan	50,000,000	2 Kecamatan	50,000,000

											2. Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Mengenai UMKM dan Dunia Usaha	30 Orang	50,000,000	30 Orang	50,000,000
											3. Jumlah Peserta yang Mengikuti Focus Group Discusion (FGD) Mengenai Peluang Investasi di Kota Prabumulih dan Potensi Unggulan	40 Orang	75,000,000	40 Orang	75,000,000
											4. Jumlah Dokumen Pembuatan Master Plant+Blue Print, Detail Engineering Desain (DED) dan Fasibility Study (FS) Peluang Investasi Kota Prabumulih Serta Penyusunan Standar Prosedure Operational Penanaman Modal	1 Dokumen	50,000,000	3 Dokumen	600,000,000
<b>x.xx.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	<b>2.18.03.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	2	18	3	2	1	<b>Penyusunan Strategis Promosi Penanaman Modal</b>	Jumlah Booklet dan Leaflet dan Paper Bag	3 Jenis (100 Booklet, 100 Leaflet, 1 Video)	35,000,000	3 Jenis (100 Booklet, 100 Leaflet, 1 Video)	40,000,000
					2	18	3	2	2	<b>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</b>	1. Jumlah Pameran Investasi di Wilayah Prov. Sumatera Selatan (Pameran INFRADA SUMSEL EXPO)	1 Pameran	110,000,000	1 Pameran	120,000,000

											2. Jumlah Pameran Pembangunan dan Karnaval Mobil Hias dalam Rangka HUT Kota Prabumulih	2 Pameran	45,000,000	2 Pameran	50,000,000
2.18.04	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dan Jumlah Izin yang diterbitkan	2.18.04.2.01	<b>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	2	18	4	2	1	<b>Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</b>	1. Jumlah Pegawai yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bidang Perizinan dan Non Perizinan	8 Orang	90,000,000	8 Orang	100,000,000
					2	18	4	2	2	<b>Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal</b>	1. Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) DPMPPTSP Kota Prabumulih	2 Laporan	40,000,000	2 Laporan	50,000,000
											2. Evaluasi dan Monitoring Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	4 Triwulan	15,000,000	4 Triwulan	20,000,000
					2	18	4	2	3	<b>Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan</b>	Dokumen Pengaduan dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	2 Laporan	40,000,000	2 Laporan	50,000,000

					2	18	4	2	4	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah</b>	Jumlah Pemberian Insentif bagi Tim Teknis dalam Percepatan Proses Perizinan dan Non Perizinan	30 Orang	135,000,000	30 Orang	150,000,000
<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<b>2.18.05.2.01</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	2	18	5	2	1	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	Jumlah Laporan Peningkatan Monitoring/Pemantauan Penanaman Modal	4 Laporan	60,000,000	4 Laporan	70,000,000
					2	18	5	2	2	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	1. Jumlah Buku Panduan LKPM Manual	100 Buku	35,000,000	120 Buku	45,000,000
											2. Jumlah Perusahaan yang Menanamkan Modalnya di Kota Prabumulih	40 Perusahaan	50,000,000	60 Perusahaan	65,000,000
											3. Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Mengenai Peraturan Terbaru di Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	40 Orang	30,000,000	50 Orang	40,000,000
					2	18	5	2	3	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	Jumlah Laporan Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian PMA/PMDN	4 Laporan	55,000,000	4 Laporan	65,000,000

											Realisasi Investasi Kota Prabumulih Melalui Kerja Sama dengan Instansi Terkait	50 Perusahaan	35,000,000	60 Perusahaan	45,000,000
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	18	6	2	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1. Pengelola data informasi di website DPMPSTP	10 Orang	73,000,000	10 Orang	73,000,000
											2. Buku Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kota Prabumulih	24 Buku	38,000,000	24 Buku	49,000,000
											3. Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik	50 Orang	35,000,000	60 Orang	45,000,000
<b>JUMLAH</b>													<b>8,548,957,329</b>		<b>9,962,473,062</b>

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DPMPTSP KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022**

Alokasi anggaran untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) dan Pendanaan DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2022

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022	
		Target	Pagu Indikatif (Rp.) Tahun 2022
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>			
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP	1 Dokumen	3,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP	1 Dokumen	3,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) DPMPTSP	1 Dokumen	3,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DPMPTSP	1 Laporan	3,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) DPMPTSP	1 Laporan	3,000,000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan untuk Pegawai DPMPTSP	1 Tahun	5,430,569,453
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Administrasi Keuangan DPMPTSP	3 Orang	22,200,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun DPMPTSP	1 Laporan	3,000,000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran DPMPTSP	1 Laporan	3,000,000
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jasa Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada DPMPTSP	2 Orang	10,800,000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Kebutuhan Alat-alat Listrik untuk Penerangan dan Jaringan Listrik	11 Jenis	4,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Kebersihan Kantor dan Tersedianya Kebutuhan Pendukung Kebersihan Kantor	23 Jenis	15,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	11 Jenis	30,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi dalam 1 Tahun	7 Jenis	24,999,600
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia dalam 1 Tahun	35 Jenis	41,789,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah dalam 1 tahun	465 Kali	180,025,000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat (Materai dan Benda Pos Lainnya)	1 Jenis	1,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Layanan Telepon, Internet dan Listrik dalam 1 Tahun	3 Rekening	70,079,250
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	2 Jenis	5,040,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor DPMPTSP dalam 1 Tahun	4 Orang	30,000,000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (STNK)	7 STNK	54,998,000
	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (BBM, Oli, Servis, Sparepart, dll)	11 Jenis	

<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>			
<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>			
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan UMKM Kecamatan-Kecamatan di Kota Prabumulih	1 Dokumen	10,000,000
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>			
<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Pembuatan Video Publikasi Profil Investasi	1 Jenis	10,000,000
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>			
<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>			
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) DPMPTSP Kota Prabumulih	2 Laporan	10,000,000
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pengaduan dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	4 Laporan	3,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	58 Kali	15,000,000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>			
<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Fitur Pengembangan Data Informasi Di Website DPMPTSP	1 Jenis	10,000,000
			<b>6,000,000,303</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2019-2023 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Kota Prabumulih serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2022.

Rencana Kerja DPMPTSP ini digunakan sebagai bahan dalam forum OPD dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020.











